

Kontribusi Pembela Tanah Air (PETA) dalam Pembentukan TNI dengan Pendekatan Historis dan Ilmu Pertahanan

Contribution of The Defender of The Homeland (PETA) in The Establishment of TNI with A Historical and Defense Science Approach

Abdi Manab Idris¹⁾, Suyono Thamrin¹⁾, Donny Yoegiantoro¹⁾ & Rinaldo Albertus²⁾*

¹⁾Program Studi Ketahanan Energi, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia, Indonesia

²⁾Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Indonesia

Diterima: 15 Mei 2022; Direview: 23 Mei 2022; Disetujui: 14 Juni 2022

*Corresponding Email: crinaldoalbertus@gmail.com

Abstrak

Tujuan Penelitian ini adalah menganalisis dan mengkaji fenomena sosial pembentukan TNI. Fokus penelitian ini mengangkat peran dan kontribusi PETA dalam pembentukan TNI dilihat dari aspek sejarah maupun ilmu pertahanan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NKRI secara garis besar pernah dijajah oleh beberapa negara eropa seperti Belanda, Portugis dan Jepang. Namun, penderitaan penjajahan paling berasa ketika Masa Kependudukan Jepang hingga membentuk Tentara Pembela Tanah Air (PETA). PETA merupakan Lembaga Keamanan yang dibentuk pada masa penjajahan Jepang di Indonesia September tahun 1943. PETA telah banyak memberikan kontribusi kepada cikal bakal NKRI sejak sebelum kemerdekaan dalam bentuk pembangkangan dan perlawanan kepada tentara Jepang, pengamanan pada prosesi kemerdekaan dan menjadi pengibar sang saka merah putih pertama kali, berubah nama menjadi Badan Keamanan Rakyat (BKR) hingga menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Selama Proses perubahan nama lembaga telah terjadi beberapa peristiwa dari pemberontakan hingga agresi militer yang dilakukan oleh Belanda. Adapun perlawanan dan operasi yang dilakukan mulai dari perang gerilya, fisik hingga non fisik. Pendekatan Historis merupakan kondisi militer PETA sejak pertama dibentuk hingga berubah menjadi TNI di berbagai daerah di Indonesia serta Pendekatan Ilmu Pertahanan yang berbentuk langkah taktis/pergerakan kemerdekaan yang berujung kontribusi PETA kepada Indonesia.

Kata Kunci: Historis; Ilmu Pertahanan; Pembela Tanah Air; Penjajahan Jepang; Tentara Nasional Indonesia

Abstract

The purpose of this study is to analyze and examine the social phenomenon of the formation of the TNI. This research is focuses on elevating the role and contribution of PETA in the formation of the TNI in terms of history and defense science. The research method used is a literature study method with a qualitative approach. The results showed that the Republic of Indonesia in general had been colonized by several European countries such as the Netherlands, Portugal and Japan. However, the suffering of colonialism was most felt when the Japanese Occupation Period formed the Defender of the Homeland Army (PETA). PETA is a security institution that was formed during the Japanese occupation of Indonesia in September 1943. PETA has contributed a lot to the forerunner of the Unitary State of the Republic of Indonesia since before independence in the form of defiance and resistance to the Japanese army, securing the independence procession and being the first to raise the saka red and white. , changed its name to the People's Security Agency (BKR) to the Indonesian National Army (TNI). During the process of changing the name of the institution there have been several incidents ranging from rebellion to military aggression by the Dutch. As for the resistance and operations carried out ranging from guerrilla warfare, physical to non-physical. The Historical Approach is a condition of PETA's military since it was first formed until it turned into the TNI in various regions in Indonesia and the Defense Science Approach in the form of a tactical step/independence movement which led to PETA's contribution to Indonesia.

Keywords: Historical; Defense Science; Patriot; Japanese Occupation; Indonesian National Army

How to Cite: Manab, A., Thamrin, S., Yoegiantoro, D., & Albertus, R. (2022). Kontribusi Pembela Tanah Air (PETA) Dalam Pembentukan TNI Dengan Pendekatan Historis dan dan Ilmu Pertahanan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 5 (1): 584-593



PENDAHULUAN

Sepanjang Sejarah Penjajahan Kolonial Belanda dan Pendudukan Jepang di Indonesia telah terjadi puluhan hingga ratusan pemberontakan skala besar maupun skala kecil sebagai bentuk protes terhadap sistem dan praktek penjajahan selama ratusan tahun lamanya. Salah satu diantaranya adalah pemberontakan yang dilakukan oleh anggota Tentara Pembela Tanah Air (PETA), Daidan Blitar terhadap Pemerintah Pendudukan Jepang. Pemberontakan mencapai klimaknya pada tanggal 14 Februari 1945 yang paling menekan kehidupan berbangsa masyarakat sekitar. Kala itu Pemberontakan PETA dipimpin oleh Sudanco Soepriyadi sehingga menghasilkan kontribusi besar untuk kemerdekaan Negara Kepulauan Republik Indonesia dan sebagai upaya cikal bakal TNI saat ini (Afandi, 2008).

Pertengahan Tahun 1943, Perang Pasifik mencapai klimaknya. Pasukan Amerika Serikat dan Australia melancarkan kampanye militer yang Panjang untuk merebut Kembali bagian yang diduduki oleh pasukan Jepang di kepulauan Solomon dan New Guinea mengalami beberapa perlawanan paling sengit selama perang. Seluruh kepulauan Solomon baru bisa direbut Kembali pada tahun 1943 (Heinrichs & Gallicchio, 2017). Menjelang berakhirnya tahun 1943 Jepang sudah menunjukkan tanda-tanda kemunduran perangnya. Bukan tidak mungkin berbagai kekurangan khususnya dibidang SDM, Jepang mulai berfikir untuk melibatkan Bangsa Indonesia dalam pertahanan wilayah (Duus, dkk, 2021). Pasukan Reguler utama Jepang akan dimobiliser semaksimal mungkin untuk melawan sekutu di Kawasan pasifik selatan sedangkan wilayah pendudukan akan dipertahankan oleh pasukan pertahanan wilayah pendudukan (*Home Guard*) yang anggotanya berasal dari orang Pribumi (Auslin, 2016).

Seorang Tokoh Nasional Bernama Gatot Mangkoe Pradja (1943) mengajukan surat permohonan kepada Saiko Sikikan yang berisi "Bahwa menurut pertimbangan hamba, rakyat Indonesia jikalau betul dan sesungguhnya hendak dipandang cakap buat turut campur dalam urusan pemerintahan dalam negeri, wajib mempersembahkan pekerjaan-pekerjaan yang nyata, dan tidak tinggal dalam keinginan saja. Maka menurut pendapat hamba adalah mewujudkan satu "Barisan Pembela", juga satu pekerjaan yang akan mewujudkan kemauan yang betul-betul dan kelak akan dapat penghargaan dari pemerintah tinggi. Oleh karena itu maka hamba sangat bermohon kehadiran paduka yang mulia, sudi apalah kiranya paduka kepada hamba memberikan kesempatan untuk menyusun barisan pembela itu, di bawah pimpinan Balatentara Dai Nippon, yang sungguh-sungguh hendak turut membela dan mempertahankan kedudukan dan keselamatan pulau Jawa dan penduduknya (Eldridge, 2017).

Perihal di atas sebetulnya tidak terpisah dari keterangan Saiko Sikikan pada bulan September 1943 juga bahwa akan melibatkan bangsa Indonesia dalam pemerintahan dalam negeri. Tidak lepas dari itu dengan berdirinya badan Chuo Sangi in dan Sangi Kai. Pembela Tanah Air (PETA) merupakan Cikal Bakal TNI (Laffan, 2021), dengan semangat juang kemerdekaan hal ini ditandai dengan terjadinya Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 merupakan klimaks dari pergerakan kemerdekaan nasional bangsa Indonesia yang dimulai sejak Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei 1908, yang digerakkan oleh para perintis kemerdekaan pada tanggal 28 Oktober 1928 dilengkapi dengan Sumpah Pemuda: "Satu Tanah Air, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Indonesia". Pergerakan Kemerdekaan Nasional Tahun 1908-1945 terdiri dari sayap politik yang meliputi sejumlah partai politik, seperti PSSI, PNI, Perindra dan sayap militer berupa PETA (Tentara Pembela Tanah Air) yang dibentuk atas gagasan perintis kemerdekaan Gatot Mangkupradja pada tahun 1943, sehingga dengan perjuangan terpadu antara sayap politik dan sayap militer pergerakan kemerdekaan nasional akhirnya dapat direalisasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, hanya dua hari setelah berakhirnya Perang Dunia II, berhasil mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia atas kekuatan sendiri.

Negara Kepulauan Republik Indonesia (NKRI) berdiri sejak dua hari setelah selesainya Perang Dunia II, maka bangsa Indonesia merupakan bangsa terjajah pertama yang berhasil melepaskan diri dari dominasi penjajahan asing, yang kemudian diikuti oleh berapuluh-puluh bangsa terjajah lain di benua Asia dan Afrika, sehingga membuka era baru, yang dilingkungan Perserikatan Bangsa-bangsa dikenal dengan nama Proses Dekolonisasi, yang mengakhiri zaman



penjajahan diseluruh dunia, sesuai dengan maksud yang tercantum pada Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945, bahwa penjajahan diatas dunia tidak sesuai dengan peri kemanusiaan. Walaupun Parta-partai Politik sebagai sayap politik dari pergerakan kemerdekaan Nasional sudah dapat terbentuk sejak tahun 1908, tidaklah demikian halnya dengan sayap militer berupa PETA, yang baru dapat dibentuk pada tahun 1943 atas gagasan dari perintis kemerdekaan Gatot Mangkupraja, yang berhasil mendapatkan fasilitas-fasilitas kemiliteran dari pihak jepang, sehingga sejumlah besar putra Indonesia memperoleh Pendidikan kemiliteran sebagai perwira dan kemudian dapat membentuk berpuluh-puluh batalyon, lengkap dengan persenjataan dan perlengkapan militer lainnya yang keseluruhan meliputi kekuatan yang teridri dari 80.000 orang di Jawa, Madura, Bali, dan Sumatra ditambah dengan sekitar 400.000 tenaga para-militer terdiri dari pemuda, pelajar dan mahasiswa yang terlatih di bidang kemiliteran (Umra S. I, 2019)

Perintis Kemerdekaan Abdul Muis membentuk Volksraad (Dewan Rakyat) pada tahun 1916 dan Wiwoho adalah juga anggota dari Volksraad yang membentuk Partai Islam Indonesia (PII) serta melaksanakan kongres pertamanya di Jakarta tahun 1940 (Darmawijaya, 2016). Mereka melakukan pergerakan dan usaha untuk membentuk sayap militer pergerakan kemerdekaan nasional dari partai dan organisasi yang dibentuk, namun kedua usaha tersebut mengalami kegagalan karena tidak berhasil mendapatkan fasilitas-fasilitas militer yang diperlukan dari pihak belanda yang berpikiran picik dan takut senjata makan tuan, serta hanya bersedia memberikan Pendidikan militer kepada putra Indonesia dalam jumlah yang kecil, yang dimasukkan dalam kesatuan-kesatuan dari tentara kolonial Belanda. Saat sayap militer pergerakan nasional terbentuk, terjadilah bentrokan-bentrokan senjata antara pasukan-pasukan PETA dan pasukan jepang, baik di Jawa maupun di Sumatra, diawali dengan pertempuran Blitar tanggal 14 Februari 1945 di bawah pimpinan perwira PETA Soepriadi, dan setelah beberapa pertempuran lain akhirnya mencapai klimaks pada peristiwa Rengasdengklok, kabupaten Karawang pada tanggal 16 Agustus 1945, dimana kompi PETA pimpinan perwira Soebeno berhasil melucuti dan menawan pasukan Jepang setempat diikuti oleh penurunan bendera jepang dan pengibaran bendera Sang Merah Putih, sehingga kecamatan Rengasdengklok merupakan wilayah Indonesia Merdeka yang pertama (Bahsan, 1955).

Ir. Soekarno, Drs. Moch Hatta dan Ahmad Soebardjo pada tanggal 16 Agustus 1945 malam tiba Kembali di Jakarta, maka bersama tokoh-tokoh generasi muda seperti B.M Diah dll, bertempat di rumah Laksamana Muda Maeda di Jl. Imam Bonjol dilakukan perumusan teks proklamasi kemerdekaan, yang esok harinya tanggal 17 Agustus 1945 pagi di bacakan oleh Soekarno di rumahnya pada Jl. Pegangsaan Timur 56 (Sekarang Jl. Proklamasi) dengan dihadiri oleh sejumlah tokoh-tokoh politik, antara lain Soewiryo dan sejumlah pasukan PETA antara lain Abdul Kadir serta dikawal oleh satu Kompi tentara PETA bersenjata lengkap, sehingga usaha sepasukan polisi militer jepang untuk membubarkan proklamasi kemerdekaan dapat digagalkan. Perwira PETA Latief Hendraningrat bertindak sebagai perwira pengibar bendera pusaka yaitu Sang Merah Putih yang pada malam sebelumnya dijahitkan oleh ibu Fatmawati Soekarno dari bahan yang disediakan oleh perwira PETA Lukas Kustaryo (Friend, 2014).

Perwira PETA Daan Jahya dan Mahasiswa Soebianto Djyohadikusuoemo (Pada 18 Agustus 1945) diutus oleh rekan-rekan seperjuangan mereka untuk menemui Wakil Presiden Hatta guna menyampaikan usul agar selutuh jajaran PETA yang terdiri dari 80.000 pasukan regular dan 400.000 tenaga para-militer dinyatakan sebagai angkatan perang resmi dari NKRI sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Undang-undang Dasar 1945. Karena Bung Hatta tidak segera dapat memberikan tanggapannya, maka pada tanggal 19 Agustus 1945 bertempat di asrama mahasiswa di Jl. Prapatan 10, diadakan pertemuan segitiga yang dihadiri oleh, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta dan Ki Hajar Dewantara beserta kelompok perwira PETA, Kasman Singodimedjo, Daan Jahya, Oetarjo, Soeyono Martosewoyo untuk membicarakan pembentukan organisasi ketentaraan NKRI, yang kaan terdiri dari jajaran PETA ditambah tenaga para-militer (pemuda, pelajar, mahasiswa), serta eksponen perorangan dari mantan pasukan *Heiho* dan *Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger* (KNIL).

Panglima tentara Jepang Letnan Jendral Nagano (19 Agustus 1945) masih mencoba-coba menghalangi pembentukan organisasi ketentaraan NKRI dengan mengeluarkan pengumuman

tentang apa yang ia sebut "Pembubaran PETA", tetapi pengumumannya itu sudah tidak mempunyai kedudukan hukum apapun di wilayah NKRI yang telah berdiri sejak tanggal 17 Agustus 1945. Sebaliknya semua pasukan BKR di seluruh wilayah NKRI segera memulai operasi serentak melucuti pasukan Jepang setempat, baik dengan perundingan secara damai ataupun dengan pertempuran berdarah, sesuai dengan sikap komandan Jepang setempat. Setiap daerah memiliki kebijaksanaannya sendiri dengan tidak lagi mengikuti perintah-perintah dari markas besar Jepang di Jakarta, sehingga pada akhir September 1945, lebih dari separuh persenjataan Jepang sudah jatuh ditangan pasukan BKR. Berdasarkan Dekrit Presiden RI tanggal 5 Oktober 1945 merubah nama BKR menjadi TKR (Tentara Keamanan Rakyat) dengan markas besarnya berkedudukan di Yogyakarta, maka semua kesatuan BKR yang sudah dipersenjatai dengan senjata yang dirampas dari Jepang, menjelma menjadi kesatuan-kesatuan TKR yang memberi perlawanan senjata yang efektif terhadap pendaratan tentara Sekutu di Medan, Padang, Palembang, Jakarta, Semarang dengan klimaksnya terjadi pada pertempuran Surabaya tanggal 10 November 1945. Pergerakan tentara Sekutu untuk lebih jauh memasuki wilayah kekuasaan NKRI praktis terhenti sama sekali, sehingga sekitar 35.000 tentara Jepang dan 40.000 APWI (*Allied Prisoners of War and Internees*) hingga akhir November 1945 masih berada di wilayah NKRI di luar jangkauan dari pasukan-pasukan Sekutu (Padiatra, 2020).

Banyumas Soedirman (Mantan Komandan PETA) selanjutnya menjadi komandan resimen BKR/TKR Banyumas, dan pada awal November 1945 berhasil memukul mundur pasukan-pasukan Sekutu dari Ambarawa ke Semarang sehingga diangkat menjadi Panglima Besar TKR yang legendaris dan memimpin perang rakyat semesta hingga ditarik mundur seluruh tentara kolonial Belanda pada awal tahun 1950. Keberhasilan TKR untuk menghentikan gerak maju pasukan Sekutu memasuki lebih jauh wilayah kekuasaan NKRI menyebabkan keberhasilan strategi militer NKRI. Oleh karenanya membuka peluang bagi Perdana Menteri Sutan Syahrir mulai mengembangkan strategi diplomatiknya, yang mengakibatkan pihak Sekutu menyerahkan tugas perdamaian Internasional kepada pihak NKRI pada tanggal 30 November 1945, setelah Panglima Sekutu Letnan Jendral Christison secara positif menanggapi tawaran Perdana Menteri Sutan Syahrir untuk bekerjasama dalam pelaksanaan tugas perdamaian internasional mengenai repatriasi tentara Jepang dan APWI.

Persetujuan Kerjasama NKRI-Sekutu tanggal 30 November 1945 dicapai dalam pertemuan di Jakarta antara wakil Menteri luar negeri Haji Agus Salim, didampingi oleh penasihat-penasihat militer Mayor Wibowo dan Mayor Oetaryo dengan wakil kepala staf Sekutu Brigadir Jendral I.C.A. Lauder didampingi oleh perwira Staf Letnan Kolonel Vanderpost dan Mayor West, sehingga pada hakekatnya persetujuan yang dicapai merupakan pengakuan *de facto* oleh pihak Sekutu terhadap eksistensi NKRI menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara yang bersahabat dan bersimpati terhadap perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Operasi pemulangan 35.000 tentara Jepang dan 40.000 APWI dikenal sebagai operasi POPDA (Panitia Oeroesan Pemoelangan Djepang dan APWI) berlangsung dari awal Desember 1945 hingga akhir Mei 1947 berturut-turut dipimpin oleh Mayor Jendral Soedibyo dan Mayor Jendral Abdul Kadir. Operasi POPDA ini menunjukkan kemampuan TNI dibawah pimpinan Panglima Besar Jendral Soedirman untuk secara simultan melakukan perang kemerdekaan di satu pihak dan tugas perdamaian internasional di lain pihak. Pergerakan tersebut telah menggambarkan jelas Kontribusi dari PETA terhadap kemerdekaan NKRI dan sebagai cikal bakal Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang akhirnya menjadi TNI dengan eksistensinya dalam menjaga keamanan, kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI sampai saat ini.

Berdasarkan hasil studi dari Pratiwi, A.P. (2016) telah menguraikan Peranan Jepang dalam pembentukan tentara Peta secara historis sebagai cikal bakal TNI dengan sudut pandang historis. Hasil yang didapatkan adalah mengetahui Tujuan Jepang membentuk Tentara Peta semula untuk menambah kekuatan militer Jepang jika Sekutu mendarat di Indonesia akan tetapi Tentara Peta berbalik melakukan perlawanan terhadap Jepang dan berjuang untuk kemerdekaan Indonesia (awal mula di Blitar yang dipimpin oleh Supriyadi). Karena menerima bantuan Jepang dalam bentuk pelatihan militer bukan berarti berkolaborasi untuk melawan Sekutu memenangkan



perang Pasifik. Kemudian mantan prajurit PETA bergabung ke dalam Badan Keamanan Rakyat (BKR). Sedangkan Laporan dari Praditya (2022) menjelaskan Pengaruh Kebijakan Pemerintah Militer Jepang dampaknya terhadap Kehidupan Sosial- Militer berskala kecil yaitu di Kedu-Syuu Tahun 1942-1945, Kedu-Syuu terdiri atas Magelang (Saat ini menjadi Pusat Pendidikan Komando Pasukan Khusus), Kebumen, Temanggung, Purworejo, dan Wonosobo.

Penelitian serupa dari Nurdiansyah (2022) melaporkan bahwa Nilai dan semangat yang telah dituliskan secara umum bahwa PETA berkontribusi dalam pembentukan budaya strategis bangsa Indonesia pada generasi muda sehingga dapat memperkuat rasa bela negara. Relevansi PETA dan budaya strategis terhadap ilmu pertahanan diasumsikan sebagai kekuatan bangsa dan negara Indonesia demi tercapainya tujuan dan menjaga kepentingan Indonesia baik dalam lingkup regional maupun global. Penelitian tentang PETA yang berfokus pada individu pembentuk PETA telah dilaporkan oleh Handayani (2018) uhd Ma'mur merupakan tentara Pembela Tanah Air (PETA) yang bertugas sebagai Shodanco (Komandan Pleton) dan menjadi anggota Badan Keamanan Rakyat (BKR). Pada tanggal 3 Oktober 1943 didirikan PETA yang berfungsi untuk mempertahankan tanah air

Telah dilaporkan penelitian terkait namun dengan pandangan ilmu pertahanan namun lokasi focus yang lebih sempit oleh Ari Sapto (2012). Ari Sapto mengungkapkan bahwa Militer Jawa Timur memiliki karakteristik tersendiri bila dibandingkan dengan militer dari provinsi lain. Realitas ini dapat dipahami bila diketahui proses pertumbuhannya. Sumber rekrutmen dan pengalaman kebersamaan menjadi faktor dominan yang memunculkan perbedaan karakteristik itu. Di tengah tekanan dan guncangan, militer Jawa Timur berusaha mempertahankan karakteristik dan independensinya. Dalam upaya itu, militer Jawa Timur senantiasa memiliki kesadaran bahwa dirinya sejatinya bagian dari Tentara Nasional Indonesia (TNI). Berdasarkan uraian penelitian diatas belum ada penelitian yang membahas kontribusi PETA secara menyeluruh terhadap pembentukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) secara historis dan ilmu pertahanan. Oleh sebab itu dalam artikel ini akan dibahas secara terperinci tentang kontribusi Pembela Tanah Air (PETA) sebagai cikal bakal dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) berdasarkan pendekatan historis dan ilmu pertahanan. Sebagai kajian ilmiah, tulisan ini tidak bermaksud sebagai upaya kultus individu ataupun mengagung-agungkan secara personal. Maksud dari tulisan ini adalah mengangkat peran dan kontribusi PETA dalam pembentukan TNI yang di lihat dari aspek sejarah (historis) maupun aspek ilmu pertahanan. Gagasan utama dari tulisan ini adalah menjawab pertanyaan, bagaimana peran dan kontribusi PETA dalam proses pembentukan TNI dilihat dari aspek historis dan aspek pertahanan.

METODE PENELITIAN

Untuk menjawab pertanyaan dan urgensi yang ada di pendahuluan, metode yang dilakukan adalah metode penelitian sejarah secara deskriptif, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi yang bertujuan untuk mengidentifikasi peran dan kontribusi dari Tentara Pembela Tanah Air (PETA) menurut pandangan ilmu pertahanan.

Pada tahap heuristik ini penulis menggunakan sumber buku yang menjadi pendukung penelitian ini. Tahapan kedua adalah kritik. Kritik merupakan tahapan penyeleksian dan pengujian data baik secara ekstern maupun intern. Ketiga adalah interpretasi, yaitu tahapan yang dilakukan dengan cara menganalisis fakta yang ada dengan menggunakan suatu pendekatan atau teori tertentu, agar diperoleh penafsiran yang objektif. Terakhir adalah historiografi yaitu tahapan lanjutan dari tahapan interpretasi yang kemudian hasilnya dituliskan menjadi kisah yang selaras.

Sumber-sumber yang digunakan di dalam penelitian ini adalah berbagai sumber seperti dokumen, jurnal, anekdot dan referensi mendukung lainnya. Data teruji ditafsirkan informasi yang terdapat didalamnya melalui interpretasi, dan tahap selanjutnya historiografi yakni disusun kisah dan uraian keseluruhan sejarahnya (Sulasman, 2014). Pada tahap ini penulis mencari dan mengumpulkan sebanyak - banyaknya sumber - sumber, baik yang berupa sebuah dokumen maupun sebuah arsip (Nugroho, 1986).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Dan Kontribusi Peta Dalam Proses Pembentukan TNI Dilihat Dari Aspek Historis

PETA dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai keamanan Rakyat, yang nantinya akan menjadi Cikal bakal TNI, PETA memiliki Markas Besar di Blitar selama masa penjajahan Jepang. Berikut adalah kondisi militer PETA dalam tahun ke tahun.

Periode Tahun 1910-1942. Bangsa Indonesia masih dalam kondisi penjajahan oleh Kolonial Belanda, Bangsa Indonesia telah melakukan berbagai cara pemberontakan di berbagai lokasi namun belum mempunyai kekuatan yang cukup untuk merebut kemerdekaan. Secara keseluruhan seperti kebijakan dan aturan di berikan oleh Pemerintahan Kolonial Belanda tanpa memikirkan kepentingan Rakyat Indonesia. Organisasi Militer sebelum kemerdekaan adalah *Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger* (KNIL), *Koninklijk Militaire Academie* (KMA), *Corps Opleiding Reserve Officieren* (CORO), dan PETA atau Gyugun. Kebijakan yang berkaitan dengan Calon Markas PETA (Blitar) hanyalah pembentukan Gementee Blitar tahun 1906 (Widuatie, 2017).

Masa Penjajahan merupakan masa saat masyarakat dipaksa untuk bercocok tanam dan hasilnya akan dibeli Belanda dengan harga yang sangat murah namun tidak jarang hasil pertanian masyarakat di rampas (tanpa tukar dan beli) sehingga menyebabkan masyarakat rugi besar. Pendidikan di kala itu tidak di peruntukkan bagi warga biasa namun hanya di peruntukkan untuk bangsa Eropa dan Orang pribumi yang mempunyai kekayaan dan keturunan terpandang yang menjabat di suatu daerah.

Pasukan Jepang (pada pertengahan bulan Januari 1942) dalam jumlah yang lebih besar mendarat di pantai utara dan timur Sumatera dan bergerak dengan cepat ke selatan. Tentara Jepang pertama kali memasuki kota Padang pada tanggal 17 Maret 1942, dan sepuluh hari kemudian, tepatnya tanggal 27 Maret 1942 komandan militer Belanda di Sumatera menyerah tanpa syarat. Sumatera langsung ditempatkan di bawah pengendalian Departemen Pemerintahan Militer (Gunseibu) Tentara ke-25 di Singapura, yang pada tahun pertama pendudukan Jepang itu membawahi langsung wilayah Sumatera dan Malaya. (Purwanti, 2018).

Menurut Sugiyarto (2013) menjelaskan bahwa pada waktu Jepang menyerah kalah kepada Sekutu tahun 1945, para perwira tersebut keluar dari tentara Peta. Atas dasar pertimbangan rasional seperti ini tidaklah terlalu berlebihan jika ada pendapat yang menyatakan bahwa tentara Peta bukanlah pemuda TNI, sekalipun tidak jarang anggota tantara Peta yang menjadi tokoh utama TNI di kemudian hari.

Periode Tahun 1942-1945. Pemerintah Jepang mengeluarkan kebijakan yang memerintahkan pembentukan Tentara Sukarela di Jawa, Sumatera, Kalimantan Utara dan Malaya untuk membantu tentara Jepang mempertahankan Indonesia dari serangan balasan tentara sekutu. Sebagai bagian dari kebijakan ini maka di bentuklah PETA di Jawa dan Gyugun di Sumatera tanpa terkecuali Sumatera Barat, dan ini merupakan peristiwa penting yang menentukan perjalanan sejarah modern Indonesia. "Gyugun (Tentara Rakyat Sukarela)" inilah yang kemudian menjadi inti kekuatan Divisi Banteng, yang memimpin perjuangan militer Sumatera Barat dalam melawan agresi militer Belanda II. Pada Periode tersebut kawasan blitar beralih fungsi menjadi kawasan militer khususnya kawasan Markas Tentara PETA, yaitu tentara sukarela dari Pemerintahan Jepang. Operasi Pengamanan juga dilakukan pada Agresi Militer I di Bondowoso oleh Mantan Periwra PETA (Yuliani, 2014).

Pada masa tersebut Jepang melakukan invasi secara besar-besaran untuk menguasai Asia-Pasifik. Setelah kekuasaan dipegang oleh Jepang, Indonesia dijajah kedua kalinya dengan penjajahan yang lebih kejam dari Kolonial Belanda. Hal tersebut dilakukan karena posisi Jepang semakin terdesak oleh serangan balik dari negara sekutu. Adapun kebijakan pertahanan yang dilakukan di kawasan militer Blitar yakni Pembuatan Parit-parit Pertahanan, di Blitar Selatan pembentukan Daidan (Batalyon) PETA yang ditempatkan di daerah Bendogerit Blitar. Masyarakat kala itu tetap dirugikan, perampasan hasil pertanian dan lain-lain tetap dilakukan demi makanan tentara Jepang sehingga sering kali terjadi kelaparan di wilayah blitar (Wiretno & Santoso, 2017).

Berdasarkan kebijakan pembuatan parit-parit pertahanan di Blitar, masyarakat Blitar dipaksa untuk menjadi pekerja bangunan. Masyarakat yang dijadikan pekerja tidak pernah diberi makan oleh Jepang sehingga di Blitar selatan banyak terjadi kematian. Tentara PETA yang



dibentuk di Blitar, sebagian dari mereka tiap hari harus menjadi pengawas para pekerja di Blitar selatan. Melihat kondisi masyarakat yang semakin tertindas, Tentara PETA di Blitar berencana untuk melakukan pemberontakan agar bangsa ini terlepas dari cengkraman Jepang. Rencana tersebut dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 1945 pukul 03.30 WIB. Meskipun pemberontakan tersebut dapat digagalkan, namun peristiwa tersebut menjadi pelecut api semangat bagi rakyat Indonesia untuk berjuang merebut kemerdekaan.

Sundhaussen (1988) menguraikan bahwa Personil BKR hingga menjadi TNI terdiri atas: Tentara PETA, KNIL dan Laskar (Pelajar dan Mahasiswa). Daerah Jawa Timur mayoritas Personil TNI berasal dari PETA dan Laskar, sampai dengan menjelang pengakuan kedaulatan, mantan anggota KNIL hampir tidak ada. Justru mantan serdadu Jepang yang tidak ingin kembali ke tanah airnya dan kemudian berjuang di pihak Republik Indonesia dan memiliki kesatuan sendiri di dalam organisasi militer Jawa Timur. Kehadiran kekuatan asing jelas-jelas merupakan sebuah ancaman bagi bayi kemerdekaan. Ketidakjelasan masalah pertahanan dan keamanan mendorong para pemuda mengambil inisiatif mempersenjatai diri dan mengambil langkah-langkah sendiri dalam rangka pertahanan. Dalam waktu-waktu kemudian terbukti bahwa keterlambatan menyusun langkah-langkah strategis organisasi tentara membawa akibat pemerintah Republik kurang mampu mengendalikan angkatan bersenjata. BKR merupakan bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang. Di dalam undang-undang pembentukannya, fungsi BKR secara samar-samar disebutkan untuk “memelihara keamanan bersama-sama dengan rakyat dan badan-badan negara yang bersangkutan”.

Daerah Jawa Timur dengan segera terbentuk BKR di kabupaten-kabupaten dan kota-kota. Sampai dengan terbentuknya Tentara Keamanan Rakyat (TKR) tanggal 5 Oktober 1945, pemerintah belum sepenuhnya memberikan arah terhadap Angkatan Bersenjata. Pemerintah membuka pendaftaran bagi calon anggota TKR melalui kantor pamongpraja di daerah-daerah. Dalam kenyataannya satuan-satuan TKR adalah kelompok-kelompok BKR yang ditransformasikan menjadi tentara.

Unsur kekuatan TKR di daerah disusun menjadi kesatuan dalam bentuk komandemen, divisi, batalyon, dan seterusnya. Di Jawa terdapat 3 komandemen dan 10 divisi, 3 divisi di antaranya terdapat di Jawa Timur. Komandemen I (Jawa Barat) di bawah pimpinan Jenderal Mayor Didi Kartasasmita, Komandemen II (Jawa Tengah) di bawah pimpinan Jenderal Mayor Suratman, Komandemen III (Jawa Timur) di bawah pimpinan Jenderal Mayor R. Mohammad. Nama, wilayah operasi, nama pimpinan kesatuan dan kedudukan divisi TKR di Jawa Timur sebagai berikut. (Sapto. 2012)

Tabel 1. Nama dan Wilayah Operasi Divisi TKR di Jawa Timur

Wilayah	Cakupan Wilayah	Di bawah Pimpinan
Divisi VI	Madiun, Kediri (Pusat kedudukan)	Kolonel Soediro
Divisi VII	Bojonegoro, Surabaya Madura Mojokerto (Pusat kedudukan)	Jenderal Mayor R.M. Jonosewoyo, kemudian digantikan oleh Kolonel Soengkono
Divisi VIII	Malang (Pusat kedudukan) Besuki	Jenderal Mayor Imam Soedjai

Sumber: Ari Sapto, 2012

Pada masa perang di Madiun, militer jawa timur diadakan reorganisasi sebab dalam peristiwa tersebut militer jawa timur yang terdiri atas mayoritas anggota PETA kehilangan 15.752 personil. Berdasarkan keputusan menteri pertahanan No.A/532/1948 tanggal 25 Oktober 1948, menetapkan bahwa penetapan susunan baru. Komando jawa terbagi atas 4 divisi, masing-masing divisi masih terdapat brigadebrigade. Dalam pembagian seperti ini, kesatuan militer yang berada di Jawa Timur berada dalam wadah Divisi I dengan susunan sebagai berikut (Surat Keputusan

Menteri Pertahanan No.A/582/1948, Djokja Documenten, no.inv. 340). Khususnya pada Pasukan RI di Jawa Timur dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Kekuatan Pasukan RI di Jawa Timur dalam Masa Perang Madiun

Karesidenan	Sept 1948	Okt 1948	Keseimbangan
Kediri	31.556	23.800	-7.756
Malang	15.001	12.100	-2.901
Surabaya	19.456	17.000	-2.456
Bojonegoro	10.539	7.900	-2.639
Jumlah	76.552	60.800	-15.752

Sumber: Ari Sapto, 2012

Berdasarkan Tabel 2. Menunjukkan bahwa terjadi pengurangan personil secara signifikan hanya dalam waktu setahun akibat dari perang madiun dan beberapa operasi militer lainnya baik itu dari dalam maupun luar Republik Indonesia.

Peran Dan Kontribusi Peta Dalam Proses Pembentukan TNI Dilihat Dari Aspek Pertahanan

Pembela Tanah Air (PETA) di daerah Sumatera di sebut dengan *Gyugun*, Pasukan itu (*Gyugun*) dilatih untuk membantu Jepang menghadapi tentara sekutu yang hendak menyerbu dan merebut Indonesia, betapa para perwira *Gyugun* memainkan peran utama sebagai tulang punggung kekuatan bersenjata Republik di Sumatera, tapi mengapa peran mereka hanya terdengar “sayup-sayup sampai” dalam sejarah militer Indonesia. Masa pendudukan Jepang (1942-1945) sering kali dianggap sebagai zaman krisis penuh ketidakpastian, tapi sekaligus membuka banyak kesempatan bagi yang mau memanfaatkannya. Di sinilah arti penting keberadaan *Gyugun*, inilah satu-satunya wadah bagi orang Sumatera untuk pertama kali mengenyam pelatihan militer. Berbeda dengan kelompok etnis Jawa, Madura, Manado, Bugis, Timor, dan Ambon, sebagian besar orang Sumatera nyaris tidak mengenal dunia ketentaraan profesional, kecuali mereka yang secara individual mendaftar masuk KNIL di Jawa. Umumnya mereka bergabung dengan *Gyugun* yang berasal dari kalangan terpelajar, terpandang hingga dari Nahdatul Ulama (NU) (Farih, 2016). Orang Sumatera, khususnya kelompok etnis Minangkabau, memasuki dunia ketentaraan lebih didorong oleh perhitungan keselamatan dan kesempatan merintis lembaga militer profesional.

PETA pertama kali didirikan pada daerah banten adalah *Daidan* I di bawah pimpinan *Daidan* Tyo K.H Syam'un dan yang kedua *Daidan* II di bawah pimpinan *Daidan* Tyo E.O Tranaya. Mula pertama *Daidan* I berkedudukan di Serang kemudian dipindahkan ke Labuan. *Daidan* Tyo K.H Syam'un mendirikan lagi *Daidan* III di Cilegon, dan *Daidan* I yang di Labuan diserahkan kepada K.H Khatib selanjutnya dinaikan pangkatnya menjadi *Daidan* Tyo setelah mengikuti latihan *Daidan* Tyo. Selanjutnya mendirikan lagi satu *Daidan* ke IV dan yang memimpinnnya adalah Uding Suryaatmaja. Di Banten ada empat batalayon (*Daidan*) PETA yaitu Batalayon I di Labuan di bawah Komandan Batalayon (*Daidanco*) KH. Acmad Chatib, Batalayon II di Kandang sapi, Malingping di bawah Komandan Entol Ternaja, Batalayon III di Cilegon di bawah Komandan KH Syam'un dan Batalayon IV di Pandeglang di bawah Komandan Uding Soeriaatmaja. Dengan dibentuknya PETA di Banten banyak pemuda memasuki badan tersebut. (Handayani, 2018)

Bagi perwira-perwira militer Jepang, keterlibatan penduduk pribumi dalam ketentaraan berlatar belakang ganda. Notosusanto (1979) mencatat bahwa perwira-perwira operasi melihat adanya kekurangan tenaga manusia, sedangkan perwira-perwira intelejen mempunyai gagasan yang lebih bersifat politis. Politis yang dimaksud adalah memberikan jaminan kepada rakyat yang diduduki negerinya oleh karena itu perlu dibentuk lembaga dalam menegakkan keamanan dari daerah yang di duduki jepang. Solusi yang ditawarkan adalah untuk membentuk PETA. Tentara PETA dibentuk oleh seksi khusus dari bagian intelijen tentara keenambelas di Jawa-Madura. Sejak semula Peta dimaksudkan sebagai salah satu sayap Barisan Asia Timur Raya, dan yang akan menjadi tulang punggung kemerdekaan Indonesia di kemudian hari. Seperti dinyatakan dalam



pidato Saiko Shikikan yang diucapkan ketika perang pasifik semakin berat dan pemerintah Jepang memerlukan bantuan rakyat Indonesia. PETA diundang sebagai pasukan gerilya bantuan yang didesentralisasikan untuk disebarkan jika terjadi serangan dari sekutu ke pulau Jawa. Secara struktural di Jawa terdapat 66 batalyon (*daidan*) tentara PETA. Setiap batalyon mempunyai 4 kompi (*Chudan*) yang masing-masing terdiri atas 3 pleton (*Shodan*). Lain dari pada itu juga terdapat seorang dokter (*eisei*), perwira peralatan (*heiki*), perwira keuangan (*keiri*), dan seorang ajudan (*fukan*). Setiap batalyon beranggotakan 500-600 orang sehingga paling tidak terdapat 14.980 orang anggota peta (Asmara, 2020).

Pembentukan *Seinen Dojo* berfungsi sebagai media untuk menguji kemampuan pemuda-pemuda Indonesia dalam masalah kemiliteran juga mempunyai tujuan lain yang sifatnya tersembunyi. Kepentingan ini erat dengan rencana Jepang dalam mempersiapkan tentara keenambelas guna kepentingan dilancarkan operasinya militer terhadap Australia atau mempersiapkan diri untuk menghadapi serbuan pihak sekutu yang akan datang menyerbu dari Australia (Perang Pasifik). Tangerang *Seinen Dojo* menempati suatu bangunan yang berada dalam kompleks gedung di daerah Batucapeur, dalam wilayah kabupaten Tangerang Pembentukan PETA oleh Jepang dimaksudkan untuk dipergunakan mempertahankan wilayah Jawa terhadap serangan tentara sekutu. Sistem pertahanan yang dipergunakan Jepang yakni: Pertahanan disusun dengan tiga lini. Lini terdepan, di pantai, terdiri atas kesatuan-kesatuan Indonesia. Dengan demikian merekalah yang akan menerima pukulan pertama dari pihak sekutu dalam serangan balasannya. Lini kedua terdapat pada dataran tinggi di tengah. Lini ketiga terdapat di gunung-gunung, kelompok tentara Jepang dan Indonesia akan melaksanakan perang gerilya (Permana, 2021).

SIMPULAN

Penjajahan merupakan bentuk ingkaran dari peri kemanusiaan dan perikeadilan yang telah di susun pada awal UUD 1945. Perlu diketahui bahwa setiap peristiwa terdapat hikmah dibalikinya. Salah satu hikmah yang dapat di petik adalah pembentukan Tentara PETA. Terbentuknya PETA menjadi cikal bakal TNI yang menjadi element pertahanan nasional. Dari rangkaian sejarah, dijelaskan bahwa tentara PETA adalah aparaturnya keamanan rakyat yang dibentuk pada masa penjajahan Jepang terhadap Indonesia yang menganut sistem fasisme. Di mana ragam kontribusi PETA yang hari ini menjadi prajurit veteran PETA telah mengorbankan harta, waktu, tenaga hingga nyawa untuk mempertahankan dan membangun kemerdekaan Negara Indonesia. Selama masa pembentukan PETA dalam periode (1943-1945) telah banyak terjadi peristiwa pemberontakan kepada penjajah Jepang, sehingga rekam jejak sejarah perjuangan itu perlu untuk selalu menjadi kajian dan disebarluaskan kepada generasi selanjutnya agar dapat melihat bagaimana usaha para pejuang saat itu dalam mempertahankan kedaulatan Negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A., & Hariyani, S. (2008), Pelestarian Markas Tentara Peta (Pembela Tanah Air) Kota Blitar. E-Journal Arsitektur. I (3). 206-226.
- Asmara, D., & Henriko, R. (2020). Kol (Purn). SB. Mansoersami Prajurit Gyugun Sumatera Barat. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial-Humaniora*, 3(1), 48-61.
- Auslin, M. (2016). Japan's new realism: Abe gets tough. *Foreign Affairs*, 95(2), 125-134.
- Bahsan, O. (1955). Tjatanan ringkas tentang: PETA ("Pembela Tanah Air") dan Peristiwa Rengasdengklok. Penerbit : N.V. Melati Bandung.
- Darmawijaya. (2016). Islam dan Nasionalisme Indonesia. *Jurnal ETNOHISTORI*, 3(2), 149-160
- Duus, P., Myers, R. H., & Peattie, M. R. (Eds.). (2021). *The Japanese wartime empire, 1931-1945*. Princeton University Press.
- Eldridge, R. D. (2017). Organization and Structure of the Contemporary Ground Self-Defense Force. In *The Japanese Ground Self-Defense Force* (pp. 19-55). Palgrave Macmillan, New York.
- Farih, A. (2016). Nahdlatul Ulama (NU) dan Kontribusinya dalam Memperjuangkan Kemerdekaan dan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 24(2), 251-284.
- Friend, T. (2014). *The Blue-Eyed Enemy*. Princeton University Press.

- Handayani, M.S. (2018). Keterlibatan Md. Juhdi Ma'mur Dalam Organisasi Pembela Tanah Air (Peta) Di Banten Tahun 1943-1945. *Tsaqofah*, 16(1), 70-79.
- Heinrichs, W., & Gallicchio, M. (2017). *Implacable Foes: War in the Pacific, 1944-1945*. Oxford University Press.
- Laffan, M. (2021). The Forgotten Jihad under Japan: Muslim Reformism and the Promise of Indonesian Independence. *Journal of the Economic and Social History of the Orient*, 64(1-2), 125-161.
- Notosutanto, N., (1986). *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press,
- Nurdiansyah, H., & Sarjito, A. (2022). Nilai Dan Semangat Tentara Pembela Tanah Air (Peta) Untuk Membangun Budaya Strategis Bangsa Indonesia Dalam Memperkuat Bela Negara. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 12(1), 44-61.
- Oetaryo, (2007). *Sejarah Pembentukan Tentara Pembela Tanah Air (PETA)*. Yayasan Pembela Tanah Air Pusat: Mantan Perwira Markas Pusat PETA Tahun 1945.
- Padiatra, A. M. Jejak Sakura Di Nusantara: Pasang Surut Hubungan Jepang-Indonesia Tahun 1880an-1974. *SASDAYA: Gadjah Mada Journal of Humanities*, 4(1), 1-12.
- Permana, R. (2021). Mayor Daan Mogot (1928-1946) Peran dan Perjuangannya. *Estoria: Journal of Social Science and Humanities*, 1(2), 110-118.
- Praditya, D. W., & Sunarti, L. (2022). Pengaruh Kebijakan Pemerintah Militer Jepang terhadap Kehidupan Sosial-Militer di Kedu-Syuu Tahun 1942-1945. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(4), 4068-4077.
- Pratiwi, A.P. (2016) Peranan Jepang dalam pembentukan tentara peta sebagai cikal bakal TNI. Makalah dan Kertas Kerja. Universitas Indonesia Library. <https://lontar.ui.ac.id/detail?id=20446966&lokasi=lokal>
- Purwanti, N. (2018). Pendudukan Jepang Pada Tahun 1942-1945 Di Rembang. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(2), 77-94.
- Sapto, A., (2012). Perkembangan Organisasi Militer di Jawa Timur 1945-1949. *MOZAIK: Jurnal Ilmu Humaniora*. 2(2). 167-180.
- Sugiyarto. (2013). Gerakan Pemuda di Depan Gerbang Kemerdekaan Indonesia. *Jurnal Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro*.
- Sulasman. (2014). *Metodologi Penelitian Sejarah*. Pustaka Setia.
- Sundhaussen, U. (1986). *Politik Militer Indonesia 1945-1967. Menuju Dwi Fungsi ABRI*. Jakarta: LP3ES.
- Umra, S. I. (2019). Penerapan Konsep Bela Negara, Nasionalisme Atau Militerisasi Warga Negara. *Lex Renaissance*, 4(1), 164-178.
- Widuatie, R. E. (2017). Pertempuran Karang Kedawung 1949: Gugurnya Letnan Kolonel Mochammad Sroedji. *Patra Widya: Seri Penerbitan Penelitian Sejarah dan Budaya*, 18(2), 237-252.
- Yayasan Pembela Tanah Air Pusat. (2021). *Dokumen Peta Cikal Bakal TNI*. Bogor: Monumen & Musem PETA.
- Yuliani, E. (2014). Agresi militer Belanda I di Bondowoso. *Avatara*, 2(1).